

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kayong Utara menjadi daerah pertama menggulirkan dana untuk program Infrastruktur Dasar Pedesaan (Infradades) di Kalimantan Barat. Di tingkat Nasional Kabupaten Kayong Utara menjadi daerah kedua se-Indonesia, setelah Kabupaten Bogor Jawa Barat yang menjalankan program tersebut (Harian Equator: 2012). Landasan hukum tentang Pelaksanaan Pembangunan Nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan dibentuknya program Infrastruktur Dasar Pedesaan (Infradades) adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pengendalian dan pemeliharannya, serta membangkitkan dan menumbuh kembangkan swadaya masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal yang ada di desa, mempercepat pemenuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat. Penyediaan infrastruktur mutlak dilakukan agar desa dapat tumbuh dan berkembang dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera dan damai. Infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan

tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara sejalan program yang sedang berjalan.

Program Infradades Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan pada pasal 1 Ayat 15, yang berbunyi “Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infradades adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada desa untuk percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang melibatkan masyarakat desa setempat secara langsung sesuai kebutuhan dasar masyarakat desa setempat.

Instansi yang bertanggungjawab dan menjalankan program Infradades adalah salah satu SKPD yang ada di kabupaten Kayong Utara yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB). Selain itu, BPMPDPKB juga melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi program bantuan keuangan Infrastruktur Dasar Pedesaan kepada Bupati. Oleh Bupati Kayong Utara dibentuk lah Tim monitoring dan evaluasi Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Dasar Pedesaan yang mana keanggotaan tim tersebut merupakan pegawai dari BPMPDPKB.

Transparansi anggaran dalam program Infradades merupakan keterbukaan mengenai anggaran yang diperuntukkan pembangunan dan

perbaikan fisik pada Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), indikator-indikator pada transparansi adalah: (1). Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, (2). Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah diakses, (3). Tersedia laporan pertanggungjawaban tepat waktu, (4). Tersedianya sarana untuk suara dan usulan publik, dan (5). Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Besaran alokasi anggaran bantuan keuangan percepatan pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan bagi setiap Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

**Besaran Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Tiap
Kecamatan**

NO	KECAMATAN	BESARAN BANTUAN
1	Sukadana	Rp 853.000.000,00
2	Simpang Hilir	Rp 1. 404.000.000,00
3	Teluk Batang	Rp 916.500.000,00
4	Seponti	Rp 809.000.000,00
5	Pulau Maya	Rp 609.000.000,00
6	Kepulauan Karimata	Rp 407.500.000,00
JUMLAH		Rp 5.000.000.000,00

Sumber: Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 202 / BPMPDPKB-A/ V/ 2013

Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi pada salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara yaitu pada Kecamatan Teluk Batang. Kecamatan Teluk Batang terdiri dari tujuh (7) desa yaitu: Alur Bandung, Sungai Paduan, Teluk Batang, Teluk Batang Utara, Teluk Batang Selatan, Masbangun dan Banyu Abang.

Berikut tabel besaran anggaran serta jenis pembangunan dan perbaikan pada tiap desa di Kecamatan Teluk Batang:

Tabel 1.2.

Besaran Anggaran dan Jenis Pembangunan tiap Desa

NO	DESA	JENIS PERBAIKAN	BESARAN ANGGARAN
1.	Alur Bandung	Pengadaan PAH dan Balai pertemuan dusun.	Rp. 114.000.000
2.	Sungai Paduan	Jembatan dan rehab gorong-gorong, pengadaan taman sekolah.	Rp. 104.000.000
3.	Teluk Batang	Penimbunan jalan, pembangunan posyandu, jembatan dan PAH.	Rp. 162.500.000
4.	Teluk Batang Utara	Sumur bor asimilasi dan pembangunan posyandu.	Rp. 56.000.000
5.	Teluk Batang Selatan	Rehab jembatan dan normalisasi saluran, pelebaran jalan.	Rp. 83.000.000
6.	Masbangun	Penimbunan jalan, rabat beton, penggalian saluran pertanian.	Rp. 186.500.000
7.	Banyu Abang	Balai pertemuan dusun, pembangunan posyandu dan rabat beton.	Rp. 210.000.000
JUMLAH			Rp 916. 000.000

Sumber : Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 202/ BPMPDPKB-A/ V/ 2013

Pencairan dana bantuan Infratraktur dasar pedesaan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Pencairan tahap pertama sebesar 50 % dari pagu anggaran bantuan keuangan yang telah ditetapkan. Pencairan tahap kedua sebesar 50 % setelah penggunaan keuangan tahap pertama dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sekurang-kurangnya mencapai 50 % berdasarkan hasil pemeriksaan TKPP.

Anggaran yang akan dicairkan untuk Kecamatan Teluk Batang dicanangkan pada pembangunan infrastruktur dalam perbaikan ruas jalan dan jembatan, pembangunan posyandu, pembangunan gedung TK dan pengadaan sumur bor asimilasi. Perbaikan ruas jalan yang menghubungkan dua kecamatan antara Teluk Batang-Seponti diperkirakan masih rusak sekitar 17 Km. Ruas jalan tersebut panjangnya sekitar 37 Km dan sebagian sudah di aspal dan mulus. Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid menargetkan ruas jalan yang menghubungkan dua kecamatan itu akan tuntas pada tahun ini. Diakui Bupati, APBD Kayong Utara pada tahun 2013 sudah lebih dari Rp 500 milyar. Akan tetapi, dana masih sangat terbatas untuk membangun daerah yang resmi terbentuk pada 26 Juni 2007 ini.

Melalui program Infradades dapat membuat kondisi di setiap desa lebih baik dari sebelumnya. Hal itulah yang sangat diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Namun, apa yang diharapkan tak sesuai dengan kenyataan, rencana tidak berjalan dengan mulus dan lancar. Hal ini di karenakan keterbatasan dana dan program tidak tepat pada sasaran. Pencairan dana Infradades pada tahun 2013 mencapai Rp 5 milyar

yang diperuntukkan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Untuk tahap pertama sudah keluar Surat Keputusan (SK) dan segera dicairkan melalui pemerintah desa masing-masing.

Melihat hal tersebut, peneliti ingin menggali lebih banyak informasi dan mengetahui besaran anggaran bantuan keuangan dalam program Infradades dan transparansi(keterbukaan) mengenai seluruh anggaran yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur di kecamatan Teluk Batang. Maka dari itulah, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Transparansi Anggaran Dalam Program Infrastruktur Dasar Pedesaan (Infradades) di Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara”.

1.2.Fokus Penelitian

Melihat adanya permasalahan yang terjadi dan akan diteliti yaitu mengenai masalah suatu program yang telah berjalan selama kurang lebih berjalan dua tahun (2012-2013), akan tetapi program tersebut belum tercapai secara maksimal dan tepat sasaran sesuai bantuan anggaran yang diperuntukkan pada pembangunan. Maka perlu adanya suatu fokus penelitian agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak meluas dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menfokuskan pada transparansi anggaran dalam Program Infradades yang akan dikaji dalam aspek : Pengumuman kebijakan, Laporan mengenai pengelolaan keuangan yang mudah di akses, laporan

pertanggungjawabana tepat waktu, sarana untuk suara dan usulan publik, dan sistem pemberian informasi kepada publik.

1.3.Perumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana transparansi anggaran dalam program Infrastruktur Dasar Pedesaan di Kecamatan Teluk Batang dikaji dalam aspek : Pengumuman kebijakan, Laporan mengenai pengelolaan keuangan yang mudah di akses, laporan pertanggungjawabana tepat waktu, sarana untuk suara dan usulan publik, dan sistem pemberian informasi kepada publik.

1.4.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- a. Pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Laporan mengenai keuangan yang mudah di akses.
- c. Laporan pertanggungjawaban tepat waktu.
- d. Sarana untuk suara dan usulan publik.
- e. Sistem pemberian informasi kepada publik.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, manfaat yang diberikan peneliti adalah untuk pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya pada aspek transparansi anggaran dalam suatu program yang dijalankan.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara khususnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) mengenai transparansi anggaran dalam menyelenggarakan program Infrastruktur Dasar Pedesaan (InfraDades).